

BAB V.
PENUTUP
KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari layanan karantina pada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur (BKHIT NTT) dipengaruhi secara signifikan oleh beberapa faktor utama, yaitu Lalu Lintas Komoditas Hewan dan Tumbuhan, kebijakan penetapan kuota ternak, serta tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak. Secara umum, kondisi lalu lintas komoditas, kuota ternak, dan tarif PNBP menunjukkan tren yang baik dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama periode pengamatan 2021–2024. Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya mampu mencapai target PNBP yang telah ditetapkan, khususnya pada tahun 2023 dan 2024.
2. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Lalu Lintas Komoditas Hewan dan Tumbuhan berpengaruh signifikan terhadap PNBP di BKHIT NTT. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi volume lalu lintas komoditas yang dilayani, semakin besar pula potensi penerimaan negara bukan pajak yang dapat dihasilkan dari layanan karantina. Dengan demikian, intensitas pergerakan komoditas menjadi faktor penting dalam menentukan besaran penerimaan PNBP.

Selain itu, kebijakan penetapan kuota ternak juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap PNBPN. Kuota ternak yang ditetapkan berfungsi sebagai instrumen pengendalian lalu lintas komoditas, namun pada saat yang sama memiliki implikasi langsung terhadap volume layanan karantina dan penerimaan negara. Kuota yang terlalu ketat berpotensi membatasi volume komoditas yang dilalulintaskan sehingga dapat menurunkan potensi penerimaan PNBPN.

Variabel tarif PNBPN juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan negara bukan pajak. Penetapan tarif yang berlaku menjadi faktor penentu dalam mengonversi volume layanan karantina menjadi pendapatan negara. Oleh karena itu, struktur tarif yang proporsional dan sesuai dengan karakteristik layanan karantina sangat diperlukan agar penerimaan PNBPN dapat dioptimalkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

3. Secara simultan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Lalu Lintas Komoditas Hewan dan Tumbuhan, kuota ternak, dan tarif PNBPN secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PNBPN di BKHIT NTT. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 67,7% menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki kontribusi yang cukup tinggi dalam menjelaskan variasi PNBPN, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti efisiensi pelayanan, kepatuhan pengguna jasa, serta faktor kebijakan eksternal lainnya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

1. Besaran target PNBPN yang ditetapkan perlu dianalisis dan dievaluasi kembali agar lebih realistis sesuai dengan potensi riil layanan karantina yang tersedia di BKHIT NTT. Penetapan target yang terlalu tinggi berpotensi menimbulkan tekanan kinerja dan tidak mencerminkan kondisi operasional yang sebenarnya.
2. Kebijakan penetapan besaran kuota ternak oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu ditinjau kembali secara berkala agar lebih adaptif terhadap dinamika lalu lintas ternak dan kebutuhan daerah. Penyesuaian kuota yang lebih fleksibel dapat meningkatkan volume layanan karantina tanpa mengabaikan aspek pengendalian dan perlindungan kesehatan hewan dan tumbuhan.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang belum dikaji, seperti tingkat kepatuhan pengguna jasa, efisiensi proses pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta faktor kebijakan eksternal yang berpotensi mempengaruhi PNBPN agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif.
4. BKHIT NTT diharapkan dapat terus meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam pelaksanaan tindakan karantina *8P* yang dapat meningkatkan PNBPN, dalam pengendalian risiko dan perlindungan *biosekuriti*.